

NASIB DAN PROSPEK GURU WIYATA BHAKTI DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh : Sutoyo

Abstraks: Kita mengakui, bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, peran guru sangat penting dan strategis. Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab guru adalah sama, baik guru yang berstatus pegawai negeri sipil, tetap yayasan maupun wiyata bhakti. Di era otonomi daerah keberadaan guru wiyata bhakti masih tetap dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru wiyata bhakti tidak boleh dipandang sebelah mata, melainkan harus diperhatikan dan diperlakukan secara profesional.

Kata Kunci: Guru, Wiyata Bhakti, Otonomi daerah.

PENDAHULUAN

Berbicara masalah "Nasib dan Prospek Guru Wiyata Bhakti" merupakan hal yang menarik. Hal ini menghadapkan kita pada suatu kompleksitas permasalahan yang klasik, fundamental, dan aktual (Koento Wibisono Siswo Mihardjo, 1993). *Klasik*, karena guru yang sudah merupakan fokus perhatian pada filsuf pada zaman Yunani Kuno di beberapa abad sebelum Masehi mulai menyebarluaskan ajaran-ajarannya dengan implikasi yang amat luas menyentuh berbagai dimensi kehidupan. *Fundamental*, karena guru merupakan ujung tombak dalam menyampaikan nilai-nilai ataupun ajaran-ajaran yang dibekalkan kepada manusia untuk menyongsong masa depan, yakni masa depan yang secara subjektif diidealkan di masa kini. *Actual*, karena setiap bangsa atau masyarakat dimanapun dan dalam kurun waktu kapanpun merasakan akan penting

mutlaknya guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Masalah guru merupakan masalah yang "terus-menerus menjadi" yang tidak pernah dapat diberi bingkai secara definitif. Oleh karena itu tidaklah mustahil jika pembicaraan mengenai guru juga tidak pernah selesai, melainkan justru akan lebih banyak mengungkapkan permasalahan baru ketimbang menemukan jawaban atau penyelesaiannya.

Yang jelas masalah guru merupakan hal yang harus dilihat secara menyeluruh dan utuh dalam konteks pendidikan di masa sekarang dan yang akan datang. Termasuk realitas keberadaan guru wiyata bhakti.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SERTA KOMPETENSI GURU

Secara umum guru mempunyai tugas, tanggung jawab dan kompetensi. Ketiga hal tersebut sebagai konsekuensi

logis dari jabatan yang bersifat professional. Piet A Sahertian (1994) mengemukakan bahwa guru yang professional dapat dipandang dari tiga dimensi, yakni : 1) memiliki keahlian, artinya seorang guru tidak saja menguasai isi pengajaran yang diajarkan tetapi juga mampu menanamkan konsep mengenai pengetahuan yang diajarkan. Penanaman konsep ini dapat terlaksana apabila guru juga memahami perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. 2) memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab. Otonomi artinya memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mengemukakan apa yang harus dikatakan berdasarkan keahliannya. Tanggung jawab artinya mampu memberikan pertanggungjawaban dan kesadaran untuk dimintai pertanggungjawaban, baik terhadap diri sendiri, siswa, orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3) memiliki rasa kesejawatan artinya berusaha menciptakan rasa kesejawatan sehingga ada rasa aman dan perlindungan jabatan.

T. Raka Joni dalam Suharsimi Arikunto (1993) mengemukakan bahwa guru yang professional harus memiliki tiga kompetensi, yakni ; 1) kompetensi professional; 2) kompetensi professional; 3) kompetensi social. Sedangkan menurut T. Raka Joni dalam Tisna Amijaya (1980) berpendapat bahwa guru yang professional

harus memiliki kemampuan kognitif, efektif dan performance.

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab guru sebenarnya tidak ada perbedaan secara prinsip antara guru Wiyata Bhakti dengan guru Non Wiyata Bhakti. Secara substansial di hadapan peserta didik "guru adalah guru". Menurut Peters dalam Nana Sudjana (2000) tugas dan tanggung jawab guru meliputi; 1) Guru sebagai Pengajar. Dalam hal ini lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran; 2) Guru sebagai pembimbing. Tugas ini merupakan aspek mendidik, sebab menyangkut pengembangan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para peserta didik; 3) Tugas sebagai administrator. Tugas ini merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dengan ketatalaksanaan pada umumnya. Sejalan dengan Peters. Amstrong dalam Nana Sudjana (2000) menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab guru meliputi; 1) tanggung jawab dalam pengajaran; 2) tanggung jawab dalam memberikan bimbingan; 3) tanggung jawab dalam mengembangkan profesi; 4) tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, guru disyaratkan memiliki kemampuan dasar atau kompetensi. Kompetensi guru yang harus

Sutoyo : Nasib dan Prospek Guru Wiyata Bhakti di Era Otonomi Daerah

dimiliki guru adalah; 1) Kompetensi bidang kognitif; 2) Kompetensi bidang sikap dan 3) Kompetensi perilaku (Nana Sudjana, 2000).

Kompetensi guru di Indonesia telah dikembangkan oleh Proyek pembinaan Pendidikan Guru (P3G) Departemen pendidikan dan Kebudayaan menurut P3G ada sepuluh kompetensi guru, yaitu; 1) menguasai bahan; 2) mengelola program belajar mengajar; 3) mengelola kelas; 4) menggunakan media/sumber belajar; 5) menguasai landasan kependidikan; 6) mengelola interaksi belajar mengajar; 7) menilai prestasi belajar; 8) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah; 9) mengenal fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan; 10) memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran

EKSISTENSI GURU WIYATA BHAKTI

Dewasa ini setiap orang mengetahui, bahwa dalam rangka men cerdasakan kehidupan bangsa, peran guru sangat strategis, karena guru sebagai motivator, dinamisator, fasilitator, mediator, pembaharu sekaligus penyampai ilmu pengetahuan kepada para siswa.

Keberadaan guru Wiyata Bhakti masih tetap dibutuhkan dan diakui oleh dunia pendidikan. Realita menunjukkan bahwa disetiap sekolah baik negeri

maupun swasta ada guru wiyata bhakti. Bahkan di sekolah swasta perbandingan jumlah guru Wiyata Bhakti dengan guru tetap di suatu sekolah ada yang jumlahnya lebih banyak guru Wiyata Bhaktinya. Hal ini terjadi karena memang kondisi sekolah antara yang satu dengan yang lain berbeda.

Perbedaan tersebut terkait dengan kemampuan suatu lembaga yang mengelolanya. Se bab jika lembaga pendidikan sudah mempunyai kemampuan yang sadar, maka perekrutan guru akan banyak yang diangkat tetap. Sebaliknya jika belum, maka lembaga akan merekrut guru yang tidak tetap.

Guru wiyata bhakti di sekolah negeri jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan guru Non wiyata bhakti bahkan prosentasenya kecil. Hal ini wajar, sebab disekolah negeri para guru adalah pegawai pemerintah yang diangkat dan digaji oleh pemerintah.

MASALAH DAN ALTERNATIF SOLOUSI

Banyak hal yang dirasakan oleh guru Wiyata Bhakti terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Secara substansi tidak ada perbedaan yang pokok antara guru Wiyata Bhakti dengan guru tetap. Apalagi dihadapan para peserta didik. Peserta didik tidak tahu apakah yang mengajar adalah guru Wiyata Bhakti atau bukan. Di hadapan peserta didik yang

mengajar mereka dianggap dan dihormati sebagai guru.

Guru wiyata bhakti mempunyai suatu pemikiran bahwa suatu saat akan dapat diangkat menjadi guru tetap baik negeri maupun yayasan. Pada masasebelum diterapkannya otonomi daerah para guru wiyata bhakti masih mempunyai harapan yang besar untuk menjadi guru negeri diselenggarakan oleh pemerintah pusat dengan melihat kebutuhan secara nasional ataupun regional. Sehingga peluang dan kesempatan bagi para guru Wiyata Bhakti lebih luas. Implikasinya para guru Wiyata Bhakti dapat mengikuti pendaftaran dan seleksi serta penempatannyapun tidak terbatas pada daerah tertentu saja.

Di era otonomi daerah peluang dan kesempatan yang dimiliki para guru Wiyata Bhakti untuk menjadi pegawai negeri lebih kecil. Sebab penerimaan akan dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing. Disisi lain juga tergantung kemampuan material daerah untuk memberikan imbalannya. Apalagi dimasa transisi sekarang ini, dimana system rekrutmen belum jelas.

Disisi lain se cara materi honor yang diterima leh guru wiyata bhakti pada umumnya belum memenuhi harapan. Bahkan konon yang diterima lebih kecil dari pada karyawan perusahaan kelas

biasa. Rendahnya honor yang diterima oleh para guru wiyata bhakti akan berdampak, baik itu terhadap diri guru itu sendiri maupun bagi sekolah.

Hal lain masalah yang dihadapi adalah kurangnya pengakuan terhadap guru wiyata bakti. Kadang-kadang guru wiyata bhakti dipandang sebelah mata kesempatan dan peluang untuk maju adakalanya tidak diberikan misalnya : jarangny guru wiyata bhakti untuk dikirim mengikuti kegiatan pelatihan, seminar ataupun bentuk-bentuk yang lain, kecuali kreativitas sendiri.

Padahal kenyataan tuntutan kualitas mengajar tidak ada perbedaan antara guru wiyata bhakti dengan yang non wiyata bhakti. Masalah-masalah tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah, para penyelenggara pendidikan, dan masyarakat untuk mencarikan alternative solusi yang terbaik. Alternative solusinya antara lain :

Pertama, PGRI sebagai wadah para guru hendaknya tidak hanya menjadi wadah para guru negeri (pegawai negeri) tetapi juga guru-guru yayasan maupun guru-guru wiyata bhakti (guru tidak tetap). Oleh karena itu PGRI harus memperjuangkan nasib para guru termasuk guru wiyata bhakti secara proporsional.

Kedua, Lembaga-lembaga pendidikan terutama swasta perlu memperbaiki manajemen pengelolaannya sehingga

Sutoyo : Nasib dan Prospek Guru Wiyata Bhakti
di Era Otonomi Daerah

kesejahteraan para guru wiyata bhakti dapat ditingkatkan peningkatan kesejahteraan ini dapat dilakukan dengan memperbesar honor mengajarnya maupun menambah jumlah jam mengajar.

Ketiga, Pemerintah daerah perlu memberikan pos Anggaran Belanja Daerah (APBD) untuk bidang pendidikan khususnya untuk honor para guru wiyata bhakti. Di samping itu untuk memberikan pengakuan secara formal guru wiyata bhakti perlu diberikan Surat Keputusan (SK) wiyata bhakti. Pemda perlu juga membuat system rekrutmen guru yang baik dan jika ada informasi penerimaan

guru pemerintah mengumumkan secara terbuka.

PENUTUP

Di era otonomi daerah keberadaan guru wiyata bhakti masih tetap dibutuhkan untuk tetap mewujudkan tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tantangan dan masalah yang dihadapi guru Wiyata Bhakti di era otonomi daerah lebih sulit dibandingkan masa sebelum otonomi daerah. Oleh karena itu solusi secara konkret perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Koento Wibisono Siswomihardjo. 1993. *Pokok-pokok Pemikiran Tentang Kebijakan dan Pengembangan Tenaga Edukatif* UNS. Historika No.6 Surakarta.

Nana Sudjana 2000. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung : Sinar Baru Algensindo

Piet A. Sahertian. 1993. *Profil Pendidik Profesional*. Yogyakarta : Andi Offset.

Suharsimi Arikunto. 1993. *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Tisna Amijaya. 1980. *Pedoman Pelaksanaan Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan*. Jakarta : Dirjen Dikti Depdikbud.